

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Jaringan Informasi Geospasial Nasional*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang *Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pedoman Nomenklatur OPD Bidang Komunikasi Dan Informatika*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Pedoman Nomenklatur OPD Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang *Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah*.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang *Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang *Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang *Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang *Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang *Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023*.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang *Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE*.

Peraturan Bupati tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten XYZ*.

Peraturan Bupati tentang *Satu Data Kabupaten*.

Peraturan Bupati tentang *Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Surat Keputusan Bupati tentang *Pembentukan Forum Satu Data Informasi Tingkat Kabupaten*.

Surat Keputusan Bupati tentang *Pembentukan Tim Walidata Pendukung dan Pengelola Aplikasi Satu Data Lingkup Pemerintah Kabupaten*.

Surat Keputusan tentang *Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten*.

Surat Keputusan Bupati tentang *Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Surat Keputusan Bupati *tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten.*

Surat Keputusan Bupati *tentang Penunjukan Tenaga Ahli IT Programmer dan Tenaga Ahli IT Maintenance Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Tahun 2024.*